

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sector pajak.

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).

Pajak yang berlaku di Indonesia menurut golongannya ada dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu contoh Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang

maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua orang pribadi atau badan, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean adalah Pengusaha.

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Setelah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya, yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan, adalah memungut, menyetorkan, melunasi, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu di ketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus di pungut, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya.

Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus di setorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna

bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak di maksudkan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang di potong atau di pungut dan di setorkannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengenaan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Padang Jaya Smudera sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009

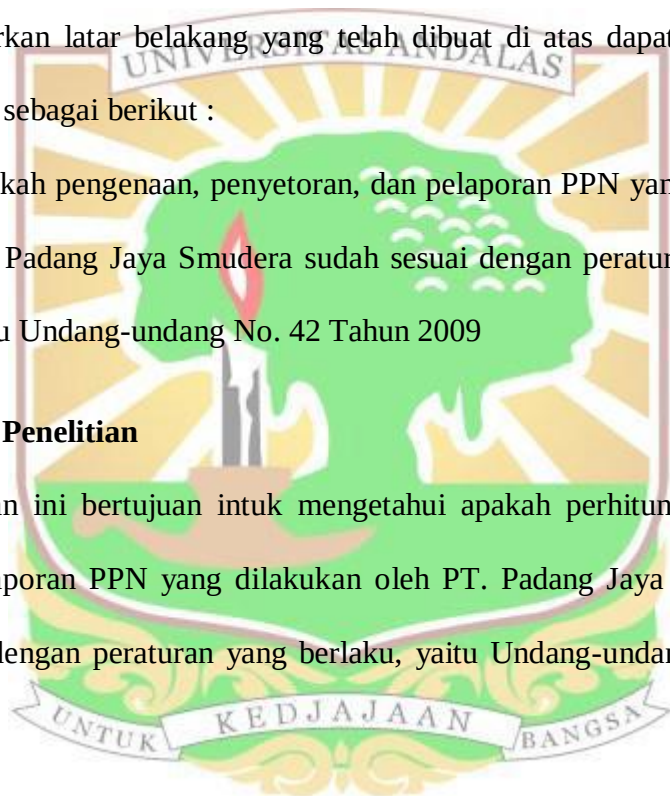
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Padang Jaya Samudera sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penulisan tugas akhir ini diantaranya :

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



- b. Hasil penelitian ini akan menjadi perbandingan antara ilmu yang didapatkan pada perkuliahan dengan praktek sesungguhnya yang ada di lapangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan ilmu perpajakan.

2. Bagi Universitas

Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

3. Bagi Perusahaan

Hasil ini dapat dijadikan sebagai kajian dan masukan untuk mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori yang membahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung penelitian.

BAB III : Gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang sejarah atau latar belakang berdirinya perusahaan dan perkembangannya, Visi dan Misi perusahaan, struktur organisasi, serta uraian tugas dari struktur organisasi perusahaan tersebut.

BAB IV : Pembahasan masalah yang menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB V : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan.

